


master SINDO

Pendidikan Kritis Pancasila

**TEUKU
KEMAL
FASYA**

 Dosen Antropologi di Universitas
Malikussaleh Lhokseumawe

Selama beberapa tahun mengajarkan mata kuliah Pancasila, saya melihat ada katup yang berhadapan dengan antara kebanggaan dan keprihatinan melihat tentang pendidikan Pancasila. Keprihatinan muncul terkait pelecehan dan omong sembarang tentang Pancasila di media sosial dan daring. Pancasila dengan mudah didistorsi pengetahuan *banal* (kasar) dari kelompok intoleran untuk membenarkan lahirnya konsep khilafah atau sistem pemerintahan monolitik Islam.

Namun di sisi lain ada kebanggaan dan optimisme, karena di kalangan mahasiswa saat ini mulai muncul antusiasme mempelajari Pancasila sebagai ilmu, kontras dengan pengalaman saya ketika mahasiswa. Mahasiswa angkatan 80-90-an melihat pendidikan Pancasila sebagai diktat ideologis yang dingin dan beku, yang jauh dari penafsiran kritis dan imajinasi sosial. Pancasila saat itu hadir sekaku dan *se-killer* dosen-dosennya.

Titik Kebanggaan

Pendidikan Pancasila yang sempat hilang beberapa tahun setelah reformasi 1998, kini mulai hadir kembali. Setelah Orde Baru, Pendidikan Moral Pancasila diganti dengan MK Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKN). Kini dua MK itu dipecah. MK Kewarganegaraan melihat secara lebih

luas konsep-konsep kewarganegaraan, mulai sejarah *citizenship*, kewarganegaraan politik, hingga kewarganegaraan multikultural yang membicarakan isu politik identitas dan hak-hak minoritas.

Saat ini Pendidikan Pancasila hadir dengan wajah yang ramah dan dialektis. Bagi saya sendiri, hal ini tentu tak lepas dari pendekatan baru dalam pengajaran, yaitu mengombinasikan dimensi historisitas, normativitas, dan kontekstualitas Pancasila.

Pada aspek historisitas, Pancasila disasar untuk fokus pada diorama seputar rapat-rapat Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) sejak 29 Mei-1 Juni 1945. "Tiga hari menentukan" itu menjadi menarik karena mahasiswa mulai mengerti rumusan Pancasila yang hadir hari ini tidaklah serta-merta "terbungkus", tapi ekstraksi dialog dan eksaminasi retorik yang intensif di antara para pemikir-pemikir kebangsaan: Mr. Soepomo, Mohammad Hatta, Muhammad Yani, Soekarno, dll.

Pada aspek normativitas, pendidikan Pancasila mulai membuka diskusi dan daya nalar kritis. Melalui konstruksi linguistik, Pancasila harus dilihat secara filosofis dari pelbagai konstruksi etika, norma, dan hukum yang hadir di Indonesia. Salah satu yang bisa dilihat adalah bagaimana posisi Pancasila di tengah konstitusi UUD 1945 yang telah mengalami empat kali amendemen itu. Apakah konstitusi amendemen di awal reformasi terlihat panggah di depan sila-sila Pancasila atau malah "melanggek" (Bahasa Aceh): melanggar dan menjauhi *Grundnorm* negara kita itu.

Adapun pada aspek kontekstualitas Pancasila harus bersinergi dengan realitas, baik dari pengalaman harian mau-

pun pengalaman sebagai bangsa. Misalnya nilai kemanusiaan yang adil dan beradab yang menjadi dasar sila kedua, apakah telah termanifestasi dalam tubuh kehidupan sosial-ekonomi kita? Apakah praktik pemerintahan nasional dan daerah telah cukup mewakili nilai-nilai keadilan sosial? Apakah konstruksi demokrasi Pancasila yang berbasis kemufakatan dan permusyawaratan cukup aktual, atau malah sebaliknya pahatan demokrasi liberal dan *pro-voting* lah yang menjadi wajah perpolitikan kontemporer. Seperti bisa kita lihat, dalam rapat pansus masalah RUU Pemilu, hasrat untuk voting lebih dikedepankan dibandingkan bermusyawarah.

Tiga pendekatan dalam mengurai Pancasila, termasuk menggunakan buku Yudi Latif, *Negara Paripurna* (2011), menjadikan pendidikan tentang Pancasila menjadi menyenangkan. Generasi saat ini adalah generasi milenial yang sama sekali tidak merasakan "trauma Pancasila" angkatan 80-90-an. Saat itu melalui mekanisme Pedoman Penghayatan Pengalaman Pancasila (P4), proses pedagoginya tak ubahnya sidik *pan-opticon* yang sama sekali tidak memancing gairah ingin tahu di kalangan peserta didik.

Trauma Pancasila

Pada 1994, saya merasakan yang disebut "trauma Pancasila" itu. Saat itu kami tergabung dalam tim debat P4 di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta berhasil menang dalam seleksi yang dilaksanakan sejak tingkat jurusan, yang kemudian terus melaju ke tingkat fakultas hingga universitas. Posisi kami terus melesat hingga putaran final di tingkat Provinsi DIY.

Kekuatan debat kami terletak pada kemampuan mengartikulasikan secara kritis si-

tuasi sosial-politik kebangsaan. Namun pada putaran final, kami harus puas menjadi *runner up*. Sang pemenang pertama yang mewakili ke tingkat nasional berasal dari sebuah perguruan tinggi swasta yang menggunakan kata-kata sakti saat debat "Pancasila itu sudah sempurna", "pemerintah tidak bersalah, yang salah hanya oknum", "jangan terbiasa mengkritik negara", dsb. Terlihat bahwa lomba debat P4 itu sendiri bukan upaya melatih kritisisme, melainkan mekanisme kepatuhan ala Ivan Pavlov demi stabilitas politik dan rekayasa nasional.

Situasi seperti itu juga terlimpas di daerah-daerah konflik. Di masa pemberlakuan Darurat Militer di Aceh (2003-2005), ada kisah masyarakat di rendam di air pematang ketika tak bisa menghafal Pancasila dengan benar. Adakalanya yang mendarat ke wajah ketika urutan-urutan dasar negara itu tidak bisadiungkap dengan lugas. Ada perburuan terhadap kelompok-kelompok kritis yang dituduh anti-Pancasila. Ada aksi premanisme yang mendaku sebagai pembela Pancasila. Ada mitos kesaktian Pancasila, dsb. Stigmatisasi itu menghadirkan suasana horor saat rezim Orde Baru berkuasa dan menjadi udara antipati ketika rezim runtuh. Pendidikan Pancasila sempat mati suri selama beberapa waktu setelah itu.

Visi Baru

Pancasila tentu harus hadir dalam penampakan dan postur baru saat ini. Kita insaf bahwa Pancasila pada masa lalu menjadi instrumen represif dan propagandis. Sebenarnya saat ini Pancasila masih diseret-seret untuk melakukan tindakan manipulatif, misalnya menggang yang simbol kiri atau kanan yang digunakan oleh anak

muda yang sebenarnya tak lebih dari gaya hidup dan subkultur.

Setelah kampanye empat pilar kebangsaan yang diinisiasi oleh Taufik Kiemas pada masa lalu, pemerintah Jokowi-JK mencoba pola pengembangan dan diseminasi baru Pancasila melalui Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP). Tentu saja pembentukan lembaga struktural ini harus dapat menjawab pelbagai hal bukan saja lemahnya daya nalar publik pada nilai-nilai intrinsik Pancasila, melainkan juga model pengajaran Pancasila di dunia pendidikan.

Pancasila harus bisa dibedah dan dikaji layaknya sains murni dan ilmu sejarah. Pelbagai hal terkait peran tokoh-tokoh bangsa masa lalu dalam menggali dan merumuskan nilai dan etik, Pancasila harus ditampilkan di depan publik agar tidak terjadi amnesia dan delusi sejarah. Fantasi-fantasi fanatisme yang dimunculkan baik dari kelompok nasionalis dan islami tentang Pancasila hendaknya dapat didudukkan secara bijaksana melalui diskusi yang tertib dan akademik. Kita tahu, orang seperti Rizieq Shihab pun mencoba mencari aspek-aspek historisitas dan genealogi Pancasila, meskipun bertujuan politis dan propagandis. Masakah hal itu tidak dilakukan oleh kaum terdidik lain yang mengaku "lebih Pancasila-lais" dengan penggalan yang lebih sistematis dan komprehensif?

Karena jika Pancasila digali dengan aura dan niat yang benar, niscaya akan tampak "kecantikan Indonesia", yaitu humanisme, toleransi, keberagaman, religiusitas, nasionalisme, gotong royong, dan solidaritas global yang antipendindasan dan perbudakan, serta pro terhadap kemajuan, perdamaian abadi, dan kebahagiaan bagi seluruh bangsa-bangsa. ●